

	News Title : Bappebti Blokir 218 Situs Investasi Ilegal	
	Media Name : Koran Jakarta	Journalist : Ant, E-10
	Publish Date : 21 April 2022	Tonality : Positive
	News Page : 5	News Value : 48,300,000
	Resources : Aldison (Kepala Biro Perundang-undangan & Penindakan Bappebti)	Ads Value : 16,100,000
	Section/Rubrication : Ekonomi	Topic : Blokir Situs Ilegal

Perlindungan Konsumen

Bappebti Blokir 218 Situs Investasi Ilegal

JAKARTA – Kementerian Perdagangan melalui Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) memblokir 218 domain situs web entitas di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK) selama Januari-Maret 2022.

“Setiap pihak yang melakukan kegiatan perdagangan berjangka di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib memiliki izin dari Bappebti serta tunduk dan patuh pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia,” kata Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan dan Penindakan Bappebti, Aldison lewat keterangannya di Jakarta, Rabu (20/4).

Meskipun mengaku memiliki legalitas dari regulator luar negeri, lanjut Aldison, jika melakukan penawaran di bidang perdagangan berjangka tetap diwajibkan memiliki izin dari Bappebti. Adapun pemblokiran dilakukan bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Aldison menambahkan Bappebti rutin melakukan pengamatan dan pengawasan terhadap situs web dan akun media sosial yang mempromosikan kegiatan PBK tanpa mempunyai izin dari Bappebti.

Pengawasan dan pengamatan serta pemblokiran ini sebagai langkah pencegahan (preventif) adanya kerugian masyarakat yang diakibatkan kegiatan PBK tanpa memiliki

izin Bappebti. Selain itu, juga untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan pelaku usaha di bidang PBK.

Aldison juga mengingatkan berinvestasi di pialang berjangka yang tidak memiliki izin dari Bappebti sangat berisiko bagi masyarakat. Bappebti selaku regulator tidak dapat memfasilitasi investor dalam rangka melakukan mediasi apabila terjadi perselisihan antara investor dengan entitas tak berizin tersebut.

“Entitas tersebut juga tidak memiliki kantor perwakilan di Indonesia. Apabila investor merasa dirugikan, tidak ada pihak yang dapat diminta untuk bertanggung jawab. Keberadaannya di luar negeri juga belum tentu dapat dipastikan legalitasnya. Hal itu memerlukan biaya tidak sedikit dalam penyelesaian perselisihan,” ungkapnya.

Rekening Terpisah

Selain itu, Bappebti tidak dapat memastikan integritas pengurus dan integritas keuangan dari entitas tersebut. Dana yang disetorkan sebagai modal investasi juga tidak dapat dijamin keamanannya karena tidak menggunakan rekening terpisah (*segregated account*) yang disetujui Bappebti.

Masyarakat yang akan berinvestasi di bidang perdagangan berjangka diimbau agar tidak mudah tergiur keuntungan besar dalam waktu singkat dan di luar batas kewajaran. ■ Ant/E-10